



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA

UNIT KERJA : DINAS PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAM PRATANADI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 519904

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 249 m2/120 m2 di KAB / KOTA BANTUL, Rp. 1.100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 159.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1991, HASIL SENDIRI
Rp. 1.500.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
10.000.000
4. MOBIL, HONDA MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI , HIBAH
TANPA AKTA , Rp. 145.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 29.050.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 152.898.969

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.441.448.969

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.441.448.969

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.